

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari hasil kajian penelitian. Bab ini memaparkan kesimpulan peneliti tentang Penerapan E-Government Kota Semarang Pada Tingkat Kelurahan. Selain kesimpulan, bab ini juga memberikan saran kepada pemerintah dan *stakeholder* penerpan *E-Govermnet* di kelurahan terutama untuk pelayanan publik agar dapat lebih baik lagi. Bab ini terbagi menjadi dua subbab, yaitu kesimpulan dan saran.

4.1. Kesimpulan

Electronic Government atau *E-Government* telah menjadi program wajib yang dilakukan oleh pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia khususnya Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Di Kota Semarang sendiri penerapan *E-Government* telah dimulai sejak tahun 2001 dan terus berkembang hingga saat ini. Pada awalnya penerapan *E-Government* di Kota Semarang hanya bersifat terpusat di lingkungan pemerintah kota saja. Saat ini penerapan *E-Government* Kota Semarang telah tersebar merata hingga pada tingkat kelurahan. Baik itu kelurahan di daerah pusat kota maupun kelurahan di daerah pengembangan. Penerpan *E-Government* di tingkat kelurahan sangat penting mengingat kelurahan merupakan perangkat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Kelurahan juga merupakan ujung tombak pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan *support*, dukungan Pemerintah Kota Semarang dalam penerapan *E-Government* di kelurahan sudah sangat baik. Bentuknya berupa regulasi-regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan *E-Government* di kelurahan. Sosialisasi juga sudah dilakukan dengan mengundang seluruh elemen pemerintah seperti dinas, kecamatan, dan kelurahan di Kota Semarang. Selain itu Pemerintah Kota Semarang melalui Diskominfo juga memfasilitasi pembuatan *website* kelurahan seperti www.pleburan.semarangkota.go.id dan www.cangkiran.semarangkota.go.id.

Berdasarkan *capacity*, Pemerintah Kota Semarang sudah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menyediakan berbagai infrastruktur teknologi informasi penunjang pelaksanaan *E-Government* baik di Kelurahan Pleburan maupun Kelurahan Cangkiran. Sementara ketersediaan sumber daya manusia di bidang ahli teknologi informasi dirasa masih sangat kurang karena di setiap kelurahan hanya difasilitasi oleh kecamatan sebanyak satu orang saja.

Berdasarkan *value* dapat disimpulkan baik dari pemerintah maupun masyarakat di Kelurahan Pleburan dan Kelurahan Cangkiran Kota Semarang telah merasakan dampak positif dari penerapan *E-Government*. Dari sisi pemerintah kelurahan dampak dari penerapan *E-Government* adalah pelayanan kepada masyarakat, pembuatan dokumen, dan pengarsipan data dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sementara dari sisi masyarakat baik di Kelurahan Pleburan maupun di Kelurahan Cangkiran merasa sangat puas terhadap pelayanan publik di kelurahan setelah diterapkannya *E-Government*.

4.2. Saran

Ada beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi agar penerapan *E-Governmet* di kelurahan terutama untuk pelayanan publik agar dapat lebih baik lagi. Adapun saran tersebut diantaranya, yaitu:

1. Penambahan jumlah sumber daya manusia yang ahli di bidang Teknologi Informasi karena satu orang di setiap kelurahan dirasa sangat kurang.
2. Diadakannya pelatihan mengenai penggunaan teknologi informasi bagi pegawai senior kelurahan agar pelayanan dapat lebih efisien lagi karena jika hanya mengandalkan pegawai muda jumlahnya sangat kurang.
3. Membuat aplikasi yang lebih mudah dan efisien karena beberapa aplikasi dirasa masih berbelit dalam pengoprasiannya.
4. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti Telkom dalam pengadaan tenaga ahli teknologi informasi dan pembuatan aplikasi.
5. Mengadakan pembaharuan perangkat teknologi informasi secara berkala dikarenakan teknologi itu terus berkembang dengan cepat.